



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FITRI ANDRIYANI, S.SOS
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KERJA
3. NHK : 410020

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.129.000.000

1. Tanah Seluas 1.634 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 157.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 570 m2/200 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 512.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/70 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 153.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 257.000.000
5. Tanah Seluas 216 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 247.850.000

1. MOTOR, HONDA SPM R 2 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.850.000
3. MOBIL, HONDA HR-V RU Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 222.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 190.000.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 22.035.369

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.588.885.369

**III. HUTANG**

Rp. 86.774.542

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.502.110.827

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.